

UPAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENGUATAN KERUKUNAN BERAGAMA DI KOTA BEKASI

Prayogi Catur Pamungkas¹, Haura Atthahara², Sopyan Resmana³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
email: prayogicaturpamungkas@gmail.com

Abstrak

Agama menjadi alat pemersatu bangsa, melalui Pancasila pertama hal itu dapat di kuatkan, keagamaan atau agama menjadi aset bagi menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan antar umat beragama tentunya memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar khususnya di Kota Bekasi yang meraih penghargaan dengan kota paling toleran yang diberikan oleh setara institute yang mana menurut peneliti bisa melebihi kota-kota lainnya yang sangat kental dengan budaya dan keberagaman di dalam satu kota tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran, struktur, dan interaksi Badan Kesbangpol Kota Bekasi dengan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam membentuk dan memengaruhi perilaku individu serta dinamika sosial dalam masyarakat untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan Studi kasus dan pengumpulan data nya dilakukan melalui observasi secara langsung, wawancara, rekaman arsip dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sangat bersungguh sungguh dalam menciptakan kerukunan dalam beragama dan menjaga toleransi yang sangat begitu tinggi dengan memberikan pelayanan, edukasi serta fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang toleransi yang bisa dilaksanakan serta kota bekasi juga menjadi representasi sebagai contoh untuk dapat ditiru dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi rasa toleransi dan kerukunan beragama.

Kata kunci: Kerukunan Beragama, Toleransi, Penguatan

Abstract

Religion is a tool to unify the nation, through Pancasila first it can be strengthened, religion or religion becomes an asset for creating harmony in the life of the nation and state, harmony between religious communities certainly has a positive impact on the surrounding environment, especially in Bekasi Regency which won the award with the most cities. tolerance provided by similar institutions which according to researchers can exceed other cities which are very rich in culture and diversity in one city, the aim of this research is to explore and analyze the role, structure and interaction of the Bekasi City Kesbangpol Agency with institutions social issues that exist in shaping and influencing individual behavior and social dynamics in society to create harmony between religious communities in Bekasi City. The research method used in this research uses a case study and data collection is carried out through direct observation, interviews, archival recordings and documentation. The results that researchers got from this research are that the Bekasi City National and Political Unity Agency is very serious about creating harmony in religion and maintaining very high tolerance by providing services, education and facilities needed to support tolerance that can be implemented and Bekasi Regency is also a representation as an example to be imitated in carrying out national and state life by upholding a sense of tolerance and religious harmony

Keywords: Religious Harmony, Tolerance, Strengthening

PENDAHULUAN

Kerukunan beragama menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan agar terwujudnya stabilitas sebuah negara. Hubungan antar umat beragama yang didasarkan kepada rasa toleransi yang tinggi, saling menghormati dan menghargai segala perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Kusrahmadi, n.d.). eStat dalam Larsson (2022) menyebutkan negara Jepang pascaperang memiliki keberagaman yang luas di tengah masyarakatnya, dengan saling menghargai perbedaan serta memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut, selalu menjaga dan menjalankan perbedaannya. Terdapat organisasi keagamaan yang besar, dengan 477 organisasi Buddha, 327 organisasi Kristen, 212 organisasi Shinto, dan 119 organisasi terdaftar sebagai “berbagai ajaran” yang bekerja di tingkat nasional dan karenanya terdaftar di bawah Kementerian Pendidikan.

lih. Takahata dalam Larsson (2022) menunjukkan beragamnya keyakinan agama yang ada pada masyarakat Jepang, berbagai tuntutan hukum yang telah diajukan mengenai prinsip-prinsip kebebasan beragama di Jepang.

Keberagaman di Indonesia menghadirkan agama-agama besar yang secara konstitusi telah diakui saat era reformasi, agama-agama tersebut meliputi: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut layak serta berhak mendapat perlindungan dari negara, hal ini sudah tercantum pada UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2. Berdasarkan dari data yang ada pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terdapat 278,69 juta jiwa jumlah penduduk yang ada di Indonesia pada pertengahan tahun 2023, apabila didasarkan kepada agama yang ada di Indonesia, pada akhir tahun 2022 sebesar 241,7 juta penduduk di Indonesia beragama Islam setara dengan 87,02% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Sejumlah 20,65 juta jiwa atau setara dengan 7,43% beragama Kristen. Kemudian, sejumlah 8,5 juta jiwa atau setara dengan 3,06% penduduk Indonesia beragama Katolik. Kemudian yang memeluk agama Hindu di Indonesia sebanyak 4,69 juta jiwa atau setara 1,69% dari populasi penduduk Indonesia. Lalu sejumlah 2,02 juta atau setara 0,73% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Buddha. Lalu yang menganut agama Konghucu sejumlah 74.899 jiwa atau sekitar 0,03%, sementara ada sebanyak 117.412 jiwa atau setara 0,04% dari populasi Indonesia yang menganut aliran kepercayaan (Rizaty, 2023). Melihat negara Indonesia adalah negara yang agamis, serta bukan sebagai negara agama tertentu. Hampir seluruh aktivitas masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari nilai-nilai agama, karena itu agama di Indonesia merupakan hal yang sangat penting, serta tidak dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, agar terciptanya kemajuan bangsa yang bersatu dan bermartabat, dengan cara memperkuat kerukunan beragama (Chudzaifah et al., 2022).

Keragaman penduduk dianggap menjadi salah satu parameter dalam mengukur pengelolaan toleransi dan kerukunan di kota. Keragaman pada latar keagamaan sebuah kota diasumsikan dapat mempengaruhi kualitas (upaya) yang dilakukan oleh pemerintah kota. Hasil scoring Indeks Kota Toleran 2023 untuk 10 (sepuluh) kota skor toleransi terendah sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Daftar Kota Intoleran

No.	Nama Kota	Skor Akhir
1.	Depok	4,010
2.	Cilegon	4,193
3.	Banda Aceh	4,260
4.	Padang	4,297
5.	Lhokseumawe	4,377
6.	Mataram	4,387
7.	Pekanbaru	4,420
8.	Palembang	4,433
9.	Bandar Lampung	4,450
10.	Sabang	4,457

Sumber: Setara Institute, 2023

Kota dengan toleransi terendah memiliki kecenderungan terhadap favoritisme atas kelompok sosial keagamaan tertentu dan berpengaruh terhadap terbentuknya peraturan-peraturan yang berbasis agama. Peraturan berbasis agama tentu akan menjadi pemicu adanya tindakan diskriminatif. Adanya kebijakan-kebijakan seperti ini dapat dilihat dalam bentuk perintah atau kewajiban untuk menggunakan identitas keagamaan tertentu dalam berpakaian di sektor pendidikan maupun pemerintahan, kewajiban pelaksanaan ibadah tertentu oleh pemerintah kota. Implementasi kebijakan tersebut nyata-nyata mengakibatkan hak-hak kelompok minoritas teramputasi, terutama hak untuk berjalan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya (Yosarie et al., 2023).

Kerukunan yang didasarkan kepada rasa toleransi yang tinggi di tengah masyarakat yang memiliki banyak perbedaan sangatlah dibutuhkan, hal tersebut menjadi solusi untuk menghindari konflik yang mengancam kesatuan di masyarakat. Berbagai elemen sangat mempengaruhi dan memiliki peran pentingnya masing-masing. Seperti kota Bekasi contohnya, Kota Bekasi berhasil meraih penghargaan Indeks Kota Toleran tahun 2023 pada peringkat kedua dari 94 Kota se-Indonesia.

Bentuk penghargaan ini adalah hasil dari kerjasama dari semua elemen yang ada di Kota Bekasi, penghargaan ini untuk Warga Kota Bekasi dengan bentuk Toleransi tinggi sesama manusia.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota besar yang ada di Provinsi Jawa Barat, letaknya yang berada di dekat DKI Jakarta menjadikan Bekasi sebagai kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan, Kota Bekasi kini menjadi sentra industri dan kawasan tempat tinggal kaum urban. Kota Bekasi juga menjadi daya tarik bagi para pendatang dari luar wilayah untuk mencari pekerjaan ataupun untuk menetap. Kota Bekasi menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan pendudukan yang cukup tinggi Renaldiansyah dalam (Hilal, 2022). Banyaknya pendatang yang datang ke kota Bekasi, membuat tingkat kemajemukan suku, budaya hingga agama menjadi semakin tinggi. Kota Bekasi pada semester 1 tahun 2023 memiliki penduduk beragama Islam berjumlah 2.214.856 (88,73%) jiwa, Kristen 190.360 (7,63%) jiwa, Katolik 64.292 (2,58%) jiwa, Hindu 4.086 (0,16%) jiwa, Buddha 21.963 (0,88%) jiwa, dan Konghucu sebanyak 131 (0,01%) jiwa (Disdukcapil Kota Bekasi, 2021). Dari data tersebut membuktikan karakteristik kota Bekasi yang multireligius dan dapat menjadi faktor terjadinya gesekan di masyarakat akibat adanya perbedaan tersebut (Hilal, 2022).

Kota Bekasi menerima penghargaan sebagai kota paling toleran kedua yang telah dikeluarkan oleh Setara Institute, hal ini menarik bagi peneliti untuk menggali bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sebagai pemerintah daerah yang memiliki peran strategis sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi No. 57.B Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi dengan menggunakan perspektif institusional. Perspektif Institusional merupakan kerangka analisis dalam ilmu sosial yang menyoroti peran, struktur, dan interaksi lembaga-lembaga sosial dalam membentuk dan memengaruhi perilaku individu serta dinamika sosial dalam masyarakat. Karakteristik perspektif institusional, yakni pemerintah memainkan peran aktif, membutuhkan pembentukan organisasi formal yang bertanggung jawab terhadap pembangunan sosial dan mengharmoniskan implementasi berbagai pendekatan strategi yang berbeda, mempromosikan pluralisme dan mengakomodasi beragam keyakinan yang ada (Midgley James, 1995). Perspektif ini menganggap bahwa lembaga-lembaga sosial memiliki peran penting dalam membentuk norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial yang mengatur interaksi sosial.

Penelitian ini berkaitan dengan kajian ilmu pemerintahan. Karena ilmu pemerintahan mempelajari mengenai kinerja dari aparatur pemerintahan saat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran, struktur, dan interaksi Badan Kesbangpol Kota Bekasi dengan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam membentuk dan memengaruhi perilaku individu serta dinamika sosial dalam masyarakat untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kota Bekasi.

METODE

Melalui penggunaan desain penelitian studi kasus ini maka penulis akan memperoleh data baik itu data sekunder maupun primer berdasarkan kondisi yang ada di lapangan ataupun kondisi yang sudah dibahas sebelumnya oleh beberapa ahli diatas, yang nantinya data itu merupakan data yang di dapat sesuai dengan yang sebenarnya mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam Penguatan Kerukunan Beragama. Jenis studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal, karena sebuah kasus yang dipilih merupakan kasus umum yang bertujuan untuk memberikan informasi dan penemuan dari kondisi sehari-hari dalam proses sosial untuk kepentingan teoritis. Kemudian penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kasus instrumental tunggal (single instrumental case study) adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu atau perhatian (Creswell, 1998).

Data yang diperoleh peneliti akan membantu mempermudah dalam menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam Upaya penguatan kerukunan beragama di kota Bekasi. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti agar bisa mendapatkan informasi atau bahan yang diperlukan dalam penelitian, teknik ini sangat penting dalam proses penelitian, karena dengan teknik pengumpulan data, maka peneliti dapat menentukan validitas dan juga kualitas data yang nantinya di peroleh, yang tentu saja akan sangat berdampak kepada hasil penelitian secara menyeluruh melalui Observasi, Wawancara, Rekaman Arsip dan Dokumentasi (Yin, 1987).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Memfasilitasi Penguatan Kerukunan Umat Beragama

Peran Fasilitatif di dedikasikan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui, menghargai kontribusi dan karya individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Dalam rangka pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat mencapai kesepakatan kerjasama dengan pihak lain (Ife & Tesoriero, 2008). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melaksanakan peran dalam memfasilitasi upaya peningkatan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi dengan melakukan pemberdayaan kepada organisasi masyarakat sebagai bentuk dalam membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam peningkatan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi secara maksimal, karena adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam setiap urusan-urusan organisasi masyarakat untuk tercapainya tujuan bersama yaitu menciptakan Kota Bekasi menjadi harmoni dan masyarakatnya menjunjung tinggi toleransi.

Selanjutnya upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi organisasi masyarakat, diantaranya:

- 1) FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang diberikan anggaran hibah sebesar Rp. 2.000.000.000,- melakukan kerja sama dengan pemuka Agama yang terhimpun dalam FKUB
- 2) MUB (Majlis Umat Beragama) melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait toleransi yang ada diwilayahnya. Dalam melakukan pembinaan diberikan honor untuk MUB Kecamatan Rp. 750,000 perbulan selama tahun anggaran, sedangkan MUB Kelurahan diberikan honor Rp. 500.000,- perbulan selama tahun anggaran.
- 3) MUI (Majlis Ulama Indonesia) dengan anggaran hibah yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melakukan kerja sama dengan organisasi NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Dewan Masjid dan Orgaisasi lainnya dalam meningkatkan moderasi beragama.

Diberikan dana hibah kepada organisasi tersebut untuk mendukung program pemerintah dalam penguatan program, upaya harmonisasi dan toleransi beragama yang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah, pemberian hibah berupa anggaran ke organisasi masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah daerah kepada organisasi masyarakat untuk memaksimalkan peran organisasi masyarakat dalam membantu pemerintah dalam merawat dan menjaga toleransi antar umat beragama.

Peran Edukasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama

Peran edukasi yaitu peran dan keterampilan dari seseorang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan atau dapat dikatakan sebagai sebuah peran yang bersifat mendidik (Ife & Tesoriero, 2008).Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam menetapkan agenda, tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu dan kelompok masyarakat. Peran edukasi ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, melatih individu, kelompok dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penguatan kerukunan umat beragama.

Sebagai bentuk dukungan terhadap adanya organisasi yang terlibat dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi tentunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada organisasi, melalui pembekalan kepada organisasi-organisasi masyarakat mengenai pemahaman program yang dilakukan pemerintah untuk penguatan dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Melalui pemberdayaan kepada organisasi masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi merupakan langkah yang sangat baik untuk bersama-sama membangun Kota Bekasi menjadi harmoni dan toleran ditengah keberagaman agama yang ada di masyarakat Kota Bekasi, dengan menjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan organisasi masyarakat akan memberikan dampak yang cukup besar melalui kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga toleransi beragama di Kota Bekasi. Seperti yang disampaikan masyarakat sebagai peserta dari kegiatan tersebut saat diwawancarai pada tanggal 28 Maret 2024, beliau menyampaikan

“Melalui kegiatan-kegiatan ini menurut saya Kesbangpol menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga atau merawat kerukunan beragama di Kota Bekasi, melalui kegiatan ini saya jadi mengetahui banyak hal baru mengenai kondisi kerukunan beragama di bekasi dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan. Saat tergabung dalam kegiatan ini tentu saja saya jadi mengetahui hal yang sedang diupayakan oleh Kesbangpol dan FKUB, mereka bersama-sama berupaya dalam penguatan kerukunan beragama di Kota Bekasi”.

Dengan ini maka akan terselenggara kegiatan yang tertuju langsung kepada masyarakat, dalam menyampaikan program-program pemerintah untuk bersama-sama membangun Kota Bekasi menjad Kota Bekasi yang harmoni dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.

Peran Representasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama

Peran representasi yaitu peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran seseorang pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008). Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan peran dimana berinteraksi dengan lembaga-lembaga di masyarakat untuk kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat. Seperti yang disampaikan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat di wawancarai pada tanggal 27 Maret 2024 melalui Pelaksana Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan,

“Kami seringkali menghadiri berbagai acara sebagai perwakilan dari pemerintah daerah Kota Bekasi, melalui acara-acara tersebut kami selalu berupaya memperkenalkan program/kegiatan yang kami lakukan, selain itu kami mengharapkan dukungan yang lebih luas dari pihak lain, membuka jaringan, mengembangkan hubungan dengan pihak dan kelompok, sehingga dapat bersama-sama mewujudkan tujuan bersama”.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini mempererat hubungan dengan seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dalam upaya penguatan kerukunan umat beragama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan berbagai hal yang terus berkomitmen untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi, yang tentu saja mewakili Walikota Bekasi sebagai kepala daerah serta seluruh lapisan masyarakat yang ingin menjalankan kehidupan bermasyarakat dan beragama dengan tenang tanpa adanya tindakan diskriminasi dari pihak manapun. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi selalu menghadiri kegiatan-kegiatan yang yang diadakan oleh organisasi masyarakat, Kesbangpol menjadi perwakilan dari Walikota Bekasi apabila berhalangan hadir pada kegiatan penguatan kerukunan beragama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi. Kehadiran dari Kesbangpol sebagai pihak dari pemerintah daerah mencerminkan sikap pemerintah daerah yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan program penguatan kerukunan beragama.

Melalui perannya dalam mewakili kepentingan dari seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penguatan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu berkomitmen dalam mengadakan ataupun menghadiri kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi unsur penting dalam membantu Walikota untuk menyampaikan seluruh programnya untukbersama-sama mengajak seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam menjaga kedamaian di Kota Bekasi. Dalam kegiatan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu menjadi perwakilan dari pihak pemerintah daerah dalam menunjukkan keseriusannya untuk mencapai tujuan dengan melakukan sinergitas terhadap lembaga-lembaga pemerintah, dan juga terhadap organisasi masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memberikan sambutan berupa materi disetiap kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk memperkuat toleransi antar umat beragama.

Peran Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama

Peran teknis berfokus pada penggunaan teknologi dan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas yang dapat meningkatkan pengalaman (Ife & Tesoriero, 2008).Peran teknis mengacu pada kemampuan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan komputer, presentasi baik lisan maupun tulisan, manajemen dan pengendalian keuangan, serta melakukan penilaian kebutuhan untuk pengembangan potensi individu, kelompok dan masyarakat.Peran tersebut dapat dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memperoleh informasi dan data bersama-sama dengan individu,

kelompok dan masyarakat, informasi dan data tersebut dapat digunakan untuk menarik perhatian para pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi untuk promosi. Oleh karena itu, pelayanan sosial memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi individu, kelompok dan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam upayanya menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi tentu harus memaksimalkan peran teknis dalam setiap urusannya, persiapan yang baik dalam hal teknis tentu akan menunjang keberhasilan dari suatu program yang ingin di jalankan, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan saat diwawancari pada tanggal 27 Maret 2024.

“Kami selalu menyimpan seluruh data dikomputer, selain itu juga kami menyimpan berkas dengan rapih, itu sebagai bentuk kesiapan kami apabila sewaktu-waktu data atau berkas tersebut dibutuhkan. Selain itu sebagai bentuk persiapan kami dalam menunjang kebutuhan disetiap kegiatan kami sudah memiliki peralatan yang cukup lengkap, sehingga saat kegiatan tidak perlu mencari alat yang diperlukan. Selain itu juga kami sudah menyediakan media sosial terkait dokumentasi kegiatan-kegiatan kami, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi bisa langsung akses ke media sosial kami”.

Setelah melakukan kegiatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu membuat arsip dari hasil dokumentasi kegiatan, seluruh gambar yang berasal dari kegiatan akan disusun rapih berupa file lengkap dengan lokasi, waktu, serta tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut. Hal ini sebagai bentuk arsip dari segala kegiatan yang dijalankan untuk nantinya dapat dijadikan sebagai bukti atau pertanggung jawaban bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melaksanakan program-programnya dengan baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sadar bahwa peran teknis sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu kegiatan, seperti yang disampaikan oleh masyarakat sebagai peserta dari kegiatan yang diadakan saat diwawancarai pada 28 Maret 2024, beliau menyampaikan

“Berdasarkan yang saya lihat tidak ada sih, mereka mempersiapkannya dengan baik, mereka juga memperhatikan kenyamanan dari seluruh peserta kegiatan-kegiatan. Menurut saya juga seluruh peserta memiliki cara pandang yang sama dalam penguatan kerukunan beragama”.

Oleh dari itu panitia penyelenggara kegiatan selalu memperhatikan segala kebutuhan teknis terkait pelaksanaan kegiatan, baik dalam memberikan pelayanan, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hingga penutupan kegiatan semua telah dipersiapkan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitas kepada pihak yang memiliki keterlibatan dalam melakukan penguatan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi merupakan salah satu langkah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk keberlangsungan suatu rencana yang ingin dijalankan. Fasilitas yang memadai akan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kualitas dan hasil dari kegiatan yang dijalankan, dengan memberikan fasilitas yang baik kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada organisasi masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam penguatan kerukunan umat beragama tentu akan membuka jalan yang sangat luas untuk berbagai pihak ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama.
2. Memberikan edukasi berupa pembekalan dan sosialisasi kepada organisasi melalui Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terhadap pemahaman program yang dilakukan pemerintah untuk penguatan toleransi dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan beragama merupakan hal yang sangat penting dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk menyampaikan program serta rencana strategis pemerintah, dengan hal ini akan menghasilkan pemahaman-pemahaman yang sama mengenai pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang rukun dan damai ditengah masyarakat Kota Bekasi yang memiliki latarbelakang agama yang berbeda-beda.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam peran representasi atau mewakili pemerintah Kota Bekasi telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Bekasi. Melalui

berbagai kegiatan yang diadakan serta selalu menghadiri kegiatan-kegiatan yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dalam menjalankan peran memfasilitasi, mendukung, serta memberikan peran teknis dengan sebaik mungkin merupakan gambaran bahwa pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Bekasi telah dilakukan dengan baik.

4. Peran teknis menjadi penentu bagi keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, oleh karena itu Kesbangpol selalu memperhatikan kondisi teknis baik itu dalam memberikan pelayanan maupun menjalankan suatu kegiatan dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama. Dengan melakukan persiapan hingga pelaksanaan kegiatan dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kondisi teknis yang mendukung, baik itu sumber daya manusianya hingga peralatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023, July 13). Jumlah Penduduk Indonesia di Pertengahan Tahun (2015-2023). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>
- Bappenas. (2021, October 22). Indeks Kerukunan Umat Beragama. <https://Datastore.Bappenas.Go.Id/Dataset/Indeks-Kerukunan-Umat-Beragama>
<https://datastore.bappenas.go.id/dataset/indeks-kerukunan-umat-beragama>
- Chudzaifah, I., Hikmah, A. N., Tarbiyah, F., & Sorong, I. (2022). Moderasi Agama: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49–56. <http://jurnal.tarbiyah.stainsorong.ac.id/index.php/al-fikr>
- Fitriani, S. (2020). Analisis: Jurnal Studi Keislaman Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179–192. <https://doi.org/10.24042/ajsk>
- Hidayah, M. S. (2018). Peran. https://repository.uin-suska.ac.id/14074/12/12.%20DAFTAR%20PUSTAKA__2018602ADN.pdf
- Hilal, N. (2022). Kata Kunci: kerukunan beragama, patron klien, politik lokal. <https://repository.upnvj.ac.id/20469/4/BAB%20I.pdf>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Institute Setara. (2022). Siaran Pers SETARA Institute. https://drive.google.com/file/d/1U_XseSoHCigJ37iSxXAFOvdSILn_BIzz/view
- Jegede, O. (2023). 12 negara paling multikultural di dunia. 1. https://www-worldexcellence-com.translate.goog/discover-the-12-most-multicultural-countries-in-the-world/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#The_most_multicultural_countries_today
- Khobir, A., Jaeni, M., & Basith, A. (2019). Multikulturalisme dalam Pandangan Ulama Nusantara (M. Nasrudin, Ed.). Penerbit NEM.
- Kusrahmadi, S. D. (n.d.). Pentingnya Kerukunan Umat Beragama. Retrieved February 14, 2024, from <https://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan/Pentingnya+Kerukunan+Umat+Beragama+18+Frb.+2007+No.+1++1.pdf>
- Larsson, E. (2022). Covenantal Pluralism in “Homogenous” Japan: Finding a Space for Religious Pluralism. *Review of Faith and International Affairs*, 20(1), 43–55. <https://doi.org/10.1080/15570274.2022.2031056>
- Mohd Khalli, M. N., Sintang, S., & Kamu, A. (2022). The framework of socio-religious harmony in Sabah, East Malaysia: An application of Fuzzy Delphi method. *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09976>
- Muhaiyat, B. (2017). Upaya. https://repository.uin-suska.ac.id/12147/7/7.%20BAB%20II_201803ADN.pdf
- Prasetyaningrum, W. (2022). Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Semarang Tahun 2019-2021. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20209/1/Skripsi_1806016015_Wulan_Prasetyaningrum.pdf
- Prayogo, A., Simamora, E., & Kusuma, N. (2020). Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurist-Diction*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17619>

- Purwandari, R., Aprilia, N., & Sir, T. A. K. (2022). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 7(2), 198. <https://doi.org/10.52615/jie.v7i2.261>
- Putra, D. H. (2019). Penguatan. <http://repository.unpas.ac.id/46511/6/BAB%20II.pdf>
- Rahman, K. (2022). Ilmu pemerintahan & Tinjauan Landasan Berfikir dari Filsafat Ilmu. www.marpyantujuh.co.id
- Resianda, A. (2018). Pemerintah Daerah. <http://repository.unpas.ac.id/34258/1/J.%20BAB%20II.pdf>
- Rizaty, M. A. (2023, March 28). Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>
- Saputra, D. (2019). Peran. <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>,
- Sugiarto, M. (2021). Interaksi Sosial Sebagai Upaya Untuk Membangun Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Tafsir Qur'an Surat Al Hujurat Ayat 13. <http://repository.iainkudus.ac.id/6928/5/5.%20BAB%20II.pdf>
- Ulfa, A. M. (n.d.). Peran Organisasi Pemuda Masjid Al-Islah dan Peran Organisasi Pemuda Gereja Imanuel dalam Membina Kerukunan Angtar Umat Beragama. Retrieved January 25, 2024, from <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6995/3/BAB%20II.pdf>
- Yosarie, I., Insiyah, S., Aiqani, N., Hasan, H., & Hasani, I. (2023). Indeks Kota Toleran TAHUN 2023 PENULIS Indeks Kota Toleran. www.setara-institute.org
- Yulianti, E. R., Maswani, & Fahrurrozi, A. (2022). Harmonisasi dan Toleransi Umat Beragama di Jawa Barat Studi Sosio Religi Masyarakat Plural. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68468/1/14_Buku%20Harmonisasi%20Umat%20Beragama.pdf
- Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. In *Qualitative Health Research* (Vol. 9, Issue 5).
- Midgley James. (1995). *Social Development*. SAGE Publications Ltd.
- Turama, A. R. (n.d.). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Retrieved March 25, 2024, from <https://core.ac.uk/download/pdf/337610533.pdf>